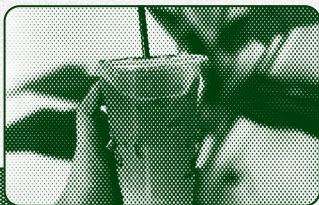


**BUKU
SAKU**



**GEN
Z**

**UNTUK KELUAR
DARI KRISIS IKLIM**



& KETIMPANGAN SOSIAL

**Buku Saku Gen Z
untuk Keluar dari Krisis Iklim
dan Ketimpangan Sosial**

Disusun oleh:
Climate Rangers Jakarta
Tahun 2026

Usia lagi *prime-prime* -nya,
tapi malah diwarisi krisis iklim.
Eh, emang kita beneran
bisa tumbuh secara prima?
In this economy?
Kerja sampai kena GERD,
gaji dipotong pajak,
tapi masih gini-gini aja.
Pemerintah bukannya biayain
korban banjir, malah
main masak-masakan.
Ujungnya, kita lagi
yang patungan.



Foto: BBC News Indonesia/HIDAYATULLAH

"...kami 310 orang tidak makan, baru hari ke 10 dapat bantuan dari swadaya masyarakat. Aku gak tahu, entah kenapa itu pemerintah Republik Indonesia tidak peduli terhadap kami orang Aceh."

-Saiful (60), korban bencana banjir Sumatra, via BBC News Indonesia

Pemerintah mengakui kalau bencana banjir Sumatra itu **bukti nyata krisis iklim**. Namun, di tengah besarnya kerusakan akibat krisis iklim, **lagi-lagi malah kita—warga yang gajinya nggak seberapa ini—yang saling turun tangan membantu korban terdampak**.

Di mana pemerintah? Di mana industri-industri energi kotor yang menyebabkan krisis iklim?

DAFTAR ISI

• <u>KENAPA HARUS #YANGMERUSAKYANGBAYAR?</u>	<u>8</u>
• <u>WINDFALL TAX BISA JADI SOLUSI DAMPAK KRISIS IKLIM?</u>	<u>15</u>
• <u>KENAPA ORANG-ORANG SUPERKAYA JUGA PERLU DIPAJAKI?</u>	<u>18</u>
• <u>TUNTUTAN MENJELANG 17 AGUSTUS 2026</u>	<u>21</u>

KENAPA HARUS #YANGMERUSAK YANGBAYAR?

Sebelum membahas lebih jauh siapa yang merusak dan siapa yang membayar, alangkah baiknya kamu pahami lebih dulu apa yang sudah kita bayarkan ke negara sebagai warga sipil biasa.

Coba lihat data di bawah! Dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I tahun 2026 ini, penerimaan pajak adalah penyokong utama APBN dengan nominal Rp1.035,7 triliun.

Rincian Komponen Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I

(Semester I 2026)

KOMPONEN	NILAI
Penerimaan Pajak	Rp1.035,7 triliun
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	Rp152,0 triliun
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp271,0 triliun
Belanja Pemerintah Pusat	Rp1.298,6 triliun
Transfer ke Daerah	Rp357,4 triliun
Sumber: Ditjen SEF Kemenkeu RI	

GoodStats

Foto: GoodStats

Dari Rp1.035,7 triliun penerimaan pajak itu, **sumbangan terbesarnya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas *basically* setiap barang dan jasa yang kita konsumsi.**

Meskipun pemerintah mencatatnya sebagai satu pos pemasukan, pemasukan negara dari PPN kita jumlahnya lebih besar dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sifatnya terbatas pada barang mewah yang tidak dimiliki semua orang.

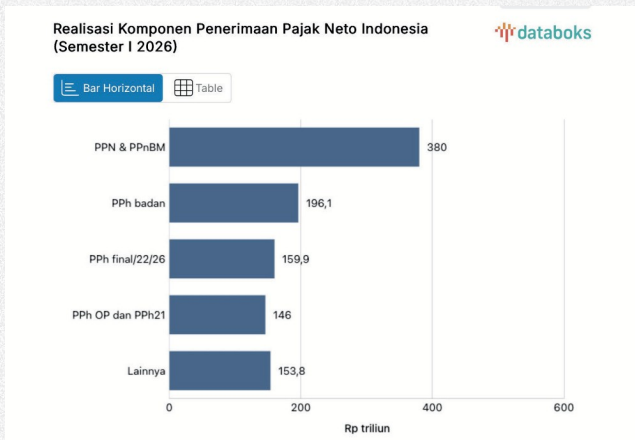


Foto: Databoks Katadata Indonesia

Jadi, kamu menyumbang banyak pajak ke negara lewat kopi aren yang kamu beli di kafe, kaos yang kamu beli di pusat perbelanjaan, atau bahkan mi instan yang sering kamu beli di minimarket.

Dari uang pajak kita yang banyak itu, apakah dipakai pemerintah buat memaksimalkan penanganan dampak krisis iklim? Yuk, kita cek!

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), belanja APBN untuk penanganan perubahan iklim rata-rata mencapai **Rp73,5 triliun per tahun**, terhitung sepanjang 2018–2024. Namun, jumlah itu masih jauh dari total kebutuhan pendanaan iklim nasional, tepatnya **baru sekitar 12,9 persen dari total kebutuhan**.

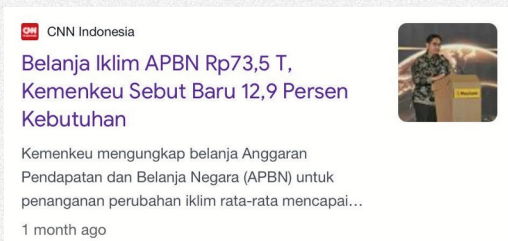


Foto: CNN Indonesia

Lalu, ke mana uang pajak kita lainnya? Ternyata, pajak kita **masih dipakai untuk subsidi bahan bakar fosil sebesar Rp203,4 triliun**. Yep, jumlah yang besar diberikan kepada subsidi energi yang merusak lingkungan. Kalau kayak gini terus, **kapan kita mau lepas dari penggunaan energi fosil?**

Secara rinci, subsidi non-energi dialokasikan sebesar Rp 104,5 triliun. Sementara subsidi energi mencapai Rp 203,4 triliun, angka yang sama dengan pagu subsidi energi tahun 2025.

Rincian subsidi energi tahun 2025 mencakup subsidi BBM sebesar Rp 26,7 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 87 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 89,7 triliun.

Foto: Kontan.co.id

Di sisi lain, anggaran **Program Makan Bergizi Gratis (MBG)** untuk 2026 bisa mencapai Rp229 triliun! Belum lagi kalau dibandingkan dengan anggaran **Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih...** Menurut Kemenkeu, pendanaan program KDMP sebesar Rp240 triliun! 🙄 Oh my god...

BT Bloomberg Technoz

BGN: Anggaran MBG 2026 Masih Disesuaikan, Sementara Rp229 T

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 untuk sementara telah diefisiensikan jadi...

3 weeks ago



Foto: Bloomberg Technoz

Kompas.com

Pemerintah Siapkan Rp 240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih Selama 6 Tahun

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pendanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebesar Rp 240 triliun...

3 weeks ago



Foto: Kompas.com

Cancel

Post



#intinyadeh, kita tuh:

- > bayar pajak terus ke negara
- > negara make uang pajak kita untuk subsidi energi fosil yang bikin kita terus ketergantungan dengan energi kotor
- > pajak kita juga dipakai buat hal yang bukan prioritas nyata bersama
- > kalau ada bencana akibat krisis iklim, rakyat lagi yang harus patungan!

Saat kita ngos-ngosan bayar kerugian dari krisis iklim, industri-industri energi fosil yang merusak lingkungan malah meraup untung triliunan!

Eh, tunggu. Industri energi fosil itu apa, sih?

Industri energi fosil merujuk ke sektor ekonomi yang bergerak dalam penambangan, pengolahan, distribusi, sampai pemasaran sumber daya alam tak terbarukan (batu bara, minyak bumi, atau gas alam) yang selama ini masih jadi pemasok utama kebutuhan energi Indonesia.

Pernah dengar Grup Adaro atau PT Bukit Asam? Mereka adalah beberapa contoh perusahaan dalam sektor energi fosil, tepatnya pertambangan batubara.

Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jenis energi yang dipakai untuk pembangkit listrik kita masih didominasi oleh energi tak terbarukan, terutama batu bara:

Realisasi Bauran Energi Primer Pembangkit Listrik Indonesia

*Berdasarkan data tahun 2016-2022

BBM Gas Batu Bara EBT

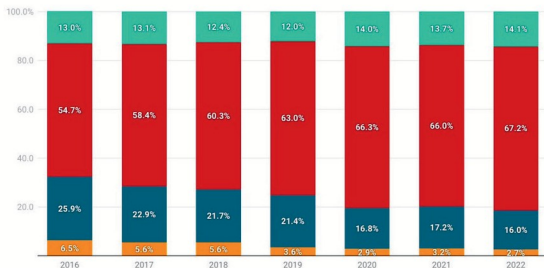


Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri • Source: Kementerian ESDM • Created with Datawrapper

Foto: CNBC Indonesia

Padahal, energi fosil itu merusak kita. Coba cek deh hasil penelitian di bawah ini tentang dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara terhadap kesehatan masyarakat:

Hasil kesehatan	Dampak kumulatif historis (2000-2025)
Kelahiran prematur	55.000 (27.000-58.000)
Kelahiran dengan berat badan kurang	36.000 (11.000-63.000)
Kunjungan ruang gawat darurat asma	100.000 (60.000-140.000)
Kasus baru asma pada anak-anak	70.000 (16.000-153.000)
Tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas (PPOK)	32.000 (12.000-59.000)
Tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas (stroke)	12.000 (3.000-24.000)
Tahun-tahun yang dijalani dengan disabilitas (diabetes)	69.000 (22.000-141.000)
Ketidakhadiran kerja (hari sakit)	41.000.000 (35.000.000-47.000.000)
Angka kematian	89.000 (55.000-140.000)
Biaya ekonomi (USD miliar) (IDR triliun)	63 (39-98) 1.050 (650-1.630)

Foto: toxic20.org

Di tengah beratnya beban krisis iklim yang kita tanggung sebagai masyarakat biasa, eeh industri-industri fosil ini malah meraup untung triliunan! 🤖

Menurut laporan keuntungan industri fosil di Q tahun 2026 ini, industri-industri fosil tercatat meraup untung triliunan dibanding tahun 2025 lalu.

PTBA +105%

Rp391,5 M → Rp801,79 M

INDIKA ENERGY +142%

Rp51,2 M → Rp124,1 M

ADRO +70%

Rp1,27 T → Rp2,16 T

Mereka dapat keuntungan fantastis, tapi nggak dipajaki ekstra. Meanwhile, rakyat imut kayak kita dikejar-kejar sampai pelosok daerah untuk bayar pajak 😊. Apa ini adil? ☹️
Seharusnya, **#YangMerusakYangBayar!**

Di materi selanjutnya, ayo kita kenalan dengan pajak spesial yang seharusnya dikenakan kepada industri-industri energi fosil ini. Namanya: *Windfall Tax*.

WINDFALL TAX BISA JADI SOLUSI DAMPAK KRISIS IKLIM?

Apa itu *Windfall Tax*?

Windfall Tax adalah jenis pajak yang dikenakan pemerintah pada industri tertentu yang telah memperoleh keuntungan fantastis akibat faktor-faktor eksternal yang tak terduga, misalnya akibat krisis geopolitik di Timur Tengah. Pajak ini dimaksudkan untuk mengalihkan keuntungan tak terduga yang didapat industri-industri tersebut ke manfaat sosial.

Sekilas berita, bagi kamu yang belum tahu:

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil alih ladang minyak Venezuela pada awal 2026 lalu dan menggunakan Israel untuk meluncurkan serangan terhadap Iran. Akibat perang antara Iran dan Israel ini, harga minyak dan sumber daya alam pun melonjak tajam.

Harga minyak mentah di AS meningkat hampir 65% dibandingkan harganya di awal tahun. Harga gas di Eropa mengalami kenaikan sebesar 92,7% selama Maret 2026. Harga batu bara global telah meningkat sebesar 49,87% dibandingkan tahun lalu.

Harga energi fosil global ini tentu saja berpengaruh pada sektor energi fosil nasional, apalagi Indonesia adalah negara yang memproduksi sumber daya alamnya. Hasilnya bisa kamu lihat sendiri di bab sebelumnya, industri batubara meraup keuntungan triliunan tahun 2026 ini!

Kalau diterapkan, pendapatan dari *Windfall Tax* seharusnya bisa dialokasikan untuk melindungi masyarakat dari krisis sosial dan kerentanan. Pemulihan daerah yang terkena bencana akibat krisis iklim, misalnya banjir Sumatra akhir tahun 2025 lalu, juga bisa teratasi lebih baik kalau kita punya pemasukan tambahan dari *Windfall Tax*.

Lebih adil, kan? Industri energi fosil yang merusak lingkungan dan dia juga yang membayar kerusakannya, bukan kita!

Sejauh mana keseriusan Indonesia menerapkan *Windfall Tax*?

Awal Mei 2026

- Pemerintah baru aja menunjukkan interest-nya buat menerapkan pajak ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang kalau mau menerapkan *Windfall Tax* terlebih dahulu ke industri pertambangan dan pengolahan nikel. Alasannya sih begini:

"Selama ini tuh kalau ekspor batubara, karena bukan, karena pajaknya nol, ga ada pajaknya, ga ada bea keluar, bea cukai ga bisa periksa sebelum barangnya berangkat. Jadi kita underinvoicing di situ besar sekali, ya boleh dibilang ga ngontrol kita," ujar Purbaya kepada pewarta dikutip Selasa (5/5/2026).

Foto: CNBC Indonesia

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mulai merancang penerapan *Windfall Tax* supaya bisa berlaku pada 2027, sebagai salah satu cara mengejar rasio penerimaan negara.

Sekarang?

- Kita masih menunggu kelanjutan proses rancangan *Windfall Tax* dari Kementerian Keuangan.

Hmm, semoga Kemenkeu nggak nunda terlalu lama ya! Ayo kita kawal terus penerapan *Windfall Tax* ini di Indonesia.

Selain *Windfall Tax*, ternyata cara lain untuk atasi krisis dan kerentanan sosial masyarakat kita?!? 🤔 Cek materi selanjutnya!

KENAPA ORANG-ORANG SUPERKAYA JUGA PERLU DIPAJAKI?

Berhenti beli kopi nggak bisa jamin hidupmu lebih layak, tapi kalau majakin orang-orang superkaya bisa.

Kata-kata populer di internet bilang kalau Gen Z harus berhenti beli kopi di kafe biar bisa beli dan tinggal di tempat tinggal yang layak.

Apakah harus begitu? Seberapa banyak gelas kopi yang harus di-cancel kalau mau bisa beli rumah layak? Dengan upah seadanya, tetap dikejar pajak secara rutin, apa berhenti beli kopi saja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak?

Di sisi lain, penghematan kita untuk nggak beli kopi itu nggak ada apa-apanya bagi 50 orang superkaya Indonesia. Kita kerja keras bertahun-tahun pun tetap sulit untuk mencapai level kekayaan mereka.

Menurut penelitian Center of Economic and Laws (CELIOS),

Total harta dari 50 orang superkaya **lebih besar dari APBN**

Kekayaan 50 orang terkaya Indonesia = **seperlima PDB Indonesia**

Harta oligarki naik **Rp13 miliar per hari**, sedangkan upah pekerja hanya naik **Rp 2 ribu/hari**

Pajak kekayaan 2% dari 50 orang terkaya Indonesia bisa mengangkat **lebih dari separuh penduduk miskin dalam 2 tahun**

Kita hidup dalam ketimpangan ekonomi yang nyata. Masyarakat berjuang mati-matian hanya untuk bisa hidup layak, sedangkan segelintir orang superkaya menguasai akses terhadap sumber daya dan terus menjadi kaya.

Untuk mengatasi krisis sosial dan kerentanan masyarakat ini, kita perlu mendukung penerapan pajak kekayaan, yaitu pajak yang menyasar individu superkaya daripada menekan kelompok miskin. **Dengan tarif progresif 1-2%, pajak kekayaan yang terkumpul diperkirakan bisa mencapai Rp142,2 triliun per tahun dan menjadi kontribusi penghapusan ketimpangan ekonomi negara.**

Dengan pajak kekayaan itu, kita bisa...

Punya 1,76 GigaWatt energi nasional yang didapat dari pembangkit listrik energi terbarukan mikrohidro

Punya 5,8 juta unit panel surya (solar panel) yang bisa dipakai oleh desa-desa terpencil

Naik KRL gratis selama 8 tahun dan punya 40 rangkaian KRL baru

Kita, orang muda, setiap hari banting tulang cuma untuk bertahan hidup di hari esok.

Di tengah situasi krisis dan pajak yang ga nggak pernah absen membebani, orang-orang muda Indonesia yang penuh empati masih sempat membantu sesama dan mereka yang lebih membutuhkan.

Padahal, ada pihak-pihak yang lebih punya tanggung jawab mengatasi situasi krisis dan ketimpangan ini—dan tugas negara adalah memastikan mereka untuk turut membayar dengan adil.

Maka dari itu, ayo kita desak pemerintah untuk:

- menerapkan *Windfall Tax* kepada industri-industri fosil yang meraup untung berlebihan
- menerapkan pajak kekayaan kepada orang-orang superkaya Indonesia
- menyiapkan anggaran transisi energi terbarukan, untuk stop ketergantungan fosil dan krisis berkepanjangan
- menyiapkan dana pemulihan dampak iklim yang dibutuhkan komunitas terdampak

Khusus di tahun 2026 ini, mari kita suarakan tuntutan kita agar dimasukkan dalam Rancangan APBN 2027 yang akan dibacakan Prabowo Subianto menjelang Hari Kemerdekaan!



Nobar dan Diskusi



Pembacaan Nota Keuangan APBN 2027

Mengawal keseriusan pemerintah untuk memasukkan solusi *Windfall Profit Tax* sebagai prioritas dalam APBN 2027

Bersama:



Muhammad Abihul Fajar
Climate Rangers Jakarta

 Jumat, 14 Agustus 2026

 13.00–17.00 WIB

 Blok M,
Jakarta Selatan
(detail akan diinfokan
setelah mendaftar)

Pendaftaran:



bit.ly/NobarPidatoPresiden

REFERENSI:

BBC News Indonesia. (2026, Jan 1). "Impian dan harapan kami sudah hanyut bersama banjir' – Tahun Baru 2026 di mata para penyintas banjir-longsor Sumatra". <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp9jr37my790>

Adritama, D. (2026, Jul 29). "Rincian Postur APBN Semester I 2026, Belanja dan Pendapatan Negara Tampil Solid!". <https://data.goodstats.id/statistic/rincian-postur-apbn-semester-i-2026-belanja-dan-pendapatan-negara-tampil-solid-iHRCI>

Muhamad, N. (2026, Jul 8). "Penerimaan Pajak RI Tumbuh 24% pada Semester I 2026". Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6a4dce8046296/penerimaan-pajak-ri-tumbuh-24-pada-semester-i-2026>

CNN Indonesia. (2026, Jul 1). "Belanja Iklim APBN Rp73,5 T, Kemenkeu Sebut Baru 12,9 Persen Kebutuhan". <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260630144214-532-1375120/belanja-iklim-apbn-rp735-t-kemenkeu-sebut-baru-129-persen-kebutuhan>

Ramadhanty, S. (2025, Jul 20). "Subsidi Energi 2026 Terancam Bengkak, Imbas Impor dari AS. Kontan.co.id". https://industri.kontan.co.id/news/subsidi-energi-2026-terancam-bengkak-imbis-impor-dari-as#goog_rewarded

Decembria, D. (2026, Jul 22). "BGN: Anggaran MBG 2026 Masih Disesuaikan, Sementara Rp229 T". Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/115847/bgn-anggaran-mbg-2026-masih-disesuaikan-mentara-rp229-t>

Rizky, D dan Teuku Muhammad Valdy Arief. (2026, Jul 18). "Pemerintah Siapkan Rp 240 Triliun untuk Kopdes Merah Putih Selama 6 Tahun". Kompas.com. Sumber: <https://money.kompas.com/read/2026/07/18/071800626/pemerintah-siapkan-rp-240-triliun-untuk-kopdes-merah-putih-selama-6-tahun>.

Putri, A. (2023, May 23). "EBT Jauh, Pembangkit Listrik RI Masih Didominasi Batu Bara" CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230523113140-128-439740/ebt-jauh-pembangkit-listrik-ri-masih-didominasi-batu-bara>

CELIOS, CREA, Trend Asia. (2025). TOXIC TWENTY; DAFTAR HITAM 20 PLTU PALING BERBAHAYA DI INDONESIA. <https://toxic20.org>

Abimanyu, A. (2026, Mar 24). "The Windfall Tax and Economic Confidence". Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/en-windfall-tax-dan-kepercayaan-ekonomi>

Madjid, Z. (2026, May 5). "Ternyata! Ini Alasan Purbaya Mau Terapkan Pajak 'Durian Runtuh". CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260505075849-4-732205/ternyata-ini-alasan-purbaya-mau-terapkan-pajak-durian-runtuh>

Rachman, A. (2026, May 8). "Bappenas Rancang Penerapan Windfall Tax Berlaku pada 2027". CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260508091215-4-733320/bappenas-rancang-penerapan-windfall-tax-berlaku-pada-2027>

Center of Economic and Law Studies (CELIOS). (2026). "Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026". https://celios.co.id/wp-content/uploads/2026/04/CELIOS_Laporan-Ketimpangan-2026.pdf

<https://www.ptba.co.id/id/media/press-release/detail/ptba-bukukan-laba-bersih-rp-801-79-miliar-di-kuartal-i-2026-naik-105-yo-y-berkat-efisiensi-dan-ketahanan-operasional>

<https://www.bareksa.com/berita/saham/2026-05-20/indika-energy-indy-cetak-laba-bersih-melesat-142-di-q1-2026-margin-bruto-naik-jadi-15>

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Financial_Statements_1Q_2026_of_ADRO&news_id=488672&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=RESULT&name=&search=y_general&q=Financial%20Statements&halaman=1

